

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah memenuhi beberapa kewajiban yang sudah dituliskan di dalam KIHESB, namun Indonesia masih kurang dalam kewajibannya untuk melindungi hak kesehatan anak terkhususnya dalam penyelenggaraan imunisasi. Masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap karena aksesibilitas dan kurangnya dukungan dari para pihak terutama orang tua yang merupakan pihak pertama dan terutama.
2. Peraturan atau kebijakan yang dimiliki Indonesia dalam beberapa faktor yang disesuaikan dengan tolak ukur WHO sudah cukup atau sudah terakomodasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami kemajuan dalam penyelenggaraan imunisasi. Namun, dalam beberapa faktor masih dibutuhkan adanya pengembangan dan pembuatan kebijakan yang baru. Mengingat Permenkes Penyelenggaraan Imunisasi dibuat pada tahun 2017, sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk mengakomodasi kebutuhan anak khususnya pada penyelenggaraan imunisasi. Kebijakan baru juga diperlukan agar peraturan tersebut lebih relevan dengan keadaan yang ada pada saat ini.
3. Informasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup. Dari segi sumber, sudah banyak sumber yang dimiliki dan dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Dalam segi aksesibilitas juga sudah terpenuhi karena pada era digital ini, dapat diasumsikan bahwa semua orang memiliki dawai yang terhubung dengan internet. Masalah yang terjadi pada informasi dan edukasi adalah malasnya masyarakat dalam mencari tahu dan mereka hanya menggunakan asumsi mereka masing-masing. Di mana asumsi tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan fakta.

4. Indonesia masih memiliki kendala dalam pengawasan, pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat tergolong kurang. Hal ini diketahui dari tidak hanya satu kejadian vaksin bodong. Selain itu, kasus mengenai vaksin bodong ini sudah berlangsung sejak lama dan baru ditangkap ketika sudah berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah kurang, karena tidak langsung tertangkap. Dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan lebih efektif untuk menutup kemungkinan adanya vaksin yang tidak sesuai dengan peraturan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mulai merancang peraturan baru yang lebih relevan mengenai upaya kesehatan imunisasi. Setelah itu pemerintah juga harus meningkatkan peran masyarakat dengan membuat kampanye dan sosialisasi lebih lagi terkhususnya kepada orang tua yang merupakan pihak terdekat dari anak. Orang tua juga harus lebih aktif dalam mencari tahu dan mengedukasi dirinya sendiri dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan dimulai dari sosial media hingga mengikuti sosialisasi yang dilakukan pada RT/RW. Informasi dan edukasi yang dilakukan juga harus lebih giat, hal ini diperlukan untuk mencegah kejadian di mana orang tua ragu untuk melakukan imunisasi kepada anak. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan imunisasi pada anak, Indonesia harus membentuk sistem yang memaksa orang tua untuk melakukan imunisasi pada anaknya. Seperti sistem di mana anak yang ingin bersekolah harus menunjukkan bukti bahwa dia sudah menerima dan mendapatkan vaksin yang harusnya dia dapatkan pada saat pendaftaran masuk sekolah.
2. Pemerintah harus memperketat pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara rutin. Seperti pengecekan ulang vaksin yang diproduksi dan disebarluaskan setiap 6

(enam) bulan sekali atau dalam jangka waktu tertentu yang sudah diketahui. Memang akan sulit untuk dilakukan pelacakan vaksin dikarenakan banyaknya jenis vaksin yang digunakan dan banyaknya fasilitas kesehatan. Jika memang sulit untuk dilakukan dan dirasa tidak mungkin, maka dapat diperketat dalam hal pemberian izin. Dengan begitu, vaksin yang tidak sesuai dapat diketahui dan langsung ditindak lanjuti. Dapat juga dilanjutkan dengan sanksi yang tegas, dalam fenomena vaksin yang sudah dijabarkan. Banyak orang merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak setimpal dengan apa yang dialami korban. Maka dari itu, dibutuhkan sanksi yang lebih tegas untuk menimbulkan efek jera agar kejadian tidak terulang dan membuat oknum yang ingin melakukan pelanggaran berpikir dua kali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP). *Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) Ringkasan Eksekutif*. Jakarta: Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP)
- K, Kordi H Ghufran M. (2015). *Durhaka Kepada Anak: Refleksi mengenai Hak & Perlindungan*. Yoyakarta: Pustak Baru Press
- Koesnan, R.A.. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Levin, Leah. (1987). *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Madin Gultom, (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Maskawati, et.al. (2017). *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Makassar: Litera.
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Smith, Rhohan dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Sugiri. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- WHO, UNICEF. (2020) *Operational Framework for Primary Health Care Transforming Vision Into Action*. Geneva: World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF)
- WHO, UNICEF. (2022) *Primary health care measurement framework and indicators: monitoring health systems through a primary health care lens*, Geneva: World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF)
- WHO. (2017) *Who Recommendations on Child Health Guidelines Approved by The WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: World Health Organization

JURNAL

- Annashy, A. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Anak di Bidang Kesehatan. *Lez Et Societatis*, 1-7.
- Dany Try Hutama Hutabarat, S. W. (2022). Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak. *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS*, 1-8.
- Fadlyansyah, M. H. (2020). Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting). *Inicio Legis Volume 1*, 2-8.
- Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia . *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2-12.
- Dedi Afandi. Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal kedokteran Universitas Riau*.
- Lilik Hanifah, dkk. (2021) Analisis Kelengkapan Imunisasi Dasar Terhadap Status Gizi Balita, *Avicenna : Journal of Health Research*, Vol 4 No 1. Maret 2021
- S, L. A. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. *Ensiklopedia Education Review*, 1-8.
- Siswanto, H. (2012). Pendidikan Kesehatan Unsur Utama Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *FIKES Universitas Respati Indonesia Jakarta*, 1-16.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Imunisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.
Konstitusi *World Health Organization*

INTERNET

Badan POM, *Penjelasan Badan POM RI Tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan*, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan#:~:text=Badan%20POM%20RI%20berwenang%20melakukan,%2C%20penindakan%2C%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat>.

Bobo, *Perbedaan Kewajiban dan Tanggung Jawab Berserta Contoh, Materi Kelas 4 SD*, <https://bobo.grid.id/read/083934686/perbedaan-kewajiban-dan-tanggung-jawab-berserta-contoh-materi-kelas-4-sd?page=all#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,%2C%20diperkarakan%2C%20dan%20sebagainya>.

Databoks, *Progres Imunisasi per April 2024, Papua Pegunungan dan Yogyakarta Terendah*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/16/progres-imunisasi-per-april-2024-papua-pegunungan-dan-yogya-terendah>,

DJHAM, *Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia*,
<https://portal.ham.go.id/2016/06/6552/#:~:text=HAM%2Dbaik%20hak%20sipil%2C%20politik,pengabaian%20terhadap%20hak%2Dhak%20lainnya>.

Ditjen P2P, *Siapa Bilang Bayar? Imunisasi Rutin itu Gratis!*,

<https://p2p.kemkes.go.id/imunisasi-rutin-itu-gratis/>

DW, *Daftar Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu*,
http://www.dw.com/id/inilah-daftar_rumah-sakit-pengguna-vaksin-palsu/a-19401575.

Forum Anak, *Konvensi Hak Anak: Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-Anak di Seluruh Dunia*,

<https://forumanak.id/artikelView/no54d08z3y>

Forum Anak Nasional, *Data Forum Anak*, <https://forumanak.id/data>
Gudang Ilmu Farmasetika, *Alasan Mengapa Harus Lebih Hati-*

hati Memberikan Obat Untuk Anak-Anak,
<https://gudangilmu.farmasetika.com/alasan-mengapa-harus-lebih-hati-hati-ketika-memberikan-obat-untuk-anak-anak/>

Hukum Online, *Vaksin untuk Anak di Sekolah, Bisakah Orang Tua Menolaknya?*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/vaksin-untuk-anak-di-sekolah--bisakah-orang-tua-menolaknya-lt5a2b5415c3878/>

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Mabes Polri: Tersangka Kasus Vaksin Palsu 23 Orang Termasuk Produsen dan 5 Dokter*,
<https://setkab.go.id/mabes-polri-tersangka-kasus-vaksin-palsu-23-orang-termasuk-produsen-dan-5-dokter/>

IDAI, *Pentingnya Imunisasi untuk Mencegah Wabah, Sakit Berat, Cacat, dan Kematian Balita-Balita*

<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/pentingnya-imunisasi-untuk-mencegah-wabah-sakit-berat-cacat-dan-kematian-bayi-balita/>

Indonesia Antropomentri, *Definisi Antropometri*,

https://antropometriindonesia.org/index.php/detail/sub/2/7/0/pengantar_antropometri

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Kementerian PPN., dan UNICEF. *Modul Pelatihan Perlindungan Anak*,
[https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Pembangun.../SPA_MODUL_1.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Pembangunan_Manusia_Masyarakat_dan_Kebudayaan/Direktorat-Keluarga-Perempuan-Anak-Pemuda-Olahraga/OUTPUT-DIREKTORAT-KPAPO-TAHUN-2016-2020/Modul-Sistem-Perlindungan-Anak/SPA_MODUL_1.pdf)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Saku Imunisasi*,
<https://p2p.kemkes.go.id/buku-saku-imunisasi-panduan-imunisasi-bagi-petugas-kesehatan/>

Kementerian Kesehatan, *Gangguan Ginjal Akut*,

[https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1872/gangguan-ginjal-akut#:~:text=Acute%20kidney%20injury%20\(AKI\)%20atau,beberapa%20jam%20atau%20beberapa%20hari,](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1872/gangguan-ginjal-akut#:~:text=Acute%20kidney%20injury%20(AKI)%20atau,beberapa%20jam%20atau%20beberapa%20hari,)

Kemenkes, *Pentingnya Imunisasi Bagi Anak*,

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak#:~:text=Imunisasi%20adalah%20upaya%20pencegahan%20penyakit,zat%20antibodi%20di%20dalam%20tubuh.,

KEMENKO PMK, *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan*,
<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

Media Indonesia, *Vonis Kasus GGAPA hanya Dua Tahun Dinilai tidak Adil*, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/vonis-kasus-ggapa-hanya-dua-tahun-dinilai-tidak-adil>

Media Indonesia, *Vonis Kasus Vaksin Palsu tidak Menjerakan*,
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/97379/vonis-kasus-vaksin-palsu-tidak-menjerakan>

Muhammadiyah, *Sejarah Vaksin dan Vaksinasi, Cara Terbaik Melawan Virus*,
<https://muhammadiyah.or.id/2021/03/sejarah-vaksin-dan-vaksinasi-cara-terbaik-melawan-virus/>.

Nabila Tashandra, *Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu*,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/14/16083471/ini.14.rumah.sakit.yang.pakai.vaksin.palsu>,

Nasrul Wathoni, *Alasan Mengapa Harus Lebih Hati-hati Ketika Memberikan Obat Untuk Anak-Anak*, https://gudangilmu.farmasetika.com/alasan-mengapa-harus-lebih-hati-hati-ketika-memberikan-obat-untuk-anak-anak/#google_vignette,

News Detik, *Salah Suntik Bikin Pasien Meninggal, 2 Perawat di Aceh Dibui 2 Tahun*, <https://news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-dibui-2-tahun>

SehatNegeriku, *OASE Kabinet Indonesia Maju Dukung Pemberian Imunisasi HPV Pada Anak*.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20231116/4744275/oase-kabinet-indonesia-maju-dukung-pemberian-imunisasi-hpv-pada-anak/>.

PHBI, *Babak Baru gagal Ginjal Akut Pada Anak*,
<https://pbhi.or.id/babak-baru-gagal-ginjal-akut-pada-anak/>

Rokom, *Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap Kini Capai 94,9 Persen*,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230507/0142927/cakupan-imunisasi-rutin-lengkap-kini-capai-949-persen>

SehatNegeriku, *Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.16% dari APBN, Naik 8.1% Dibanding 2023*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230816/0643661/anggaran-kesehatan-2024-ditetapkan-sebesar-5-6-dari-apbn-naik-8-1-dibanding-2023/>.

SehatNegeriku, *Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut Pada Anak, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230206/5642343/kasus-baru-gangguan-ginjal-akut-pada-anak-pemerintah-siapkan-langkah-antisipatif/>

SehatNegeriku, *Kasus GGAPA: Pemerintah Berfokus Pada Penyelamanat Nyawa*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221216/4942040/kasus-ggapa-pemerintah-berfokus-pada-penyelamatan-nyawa/>

SehatNegeriku, *Langkah Pemerintah Dalam Penanganan Vaksin Palsu*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160830/3018278/langkah-pemerintah-dalam-penanganan-vaksin-palsu/>

SehatNegeriku, *Wajib Imunisasi, Pelanggar Kena Sanksi*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170429/3620688/wajib-imunisasi-pelanggar-kena-sanksi/>,

TaviphAMDANI, *Upaya Kesehatan Masyarakat*, <http://puskesmaskokap1.kulonprogokab.go.id/detil/56/upaya-kesehatan-masyarakat>,

UNICEF, *Hak-hak Anak yang Penting untuk Kita Ketahui*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,mempertimbangkan%20kepentingan%20terbaik%20bagi%20anak.>

UNICEF, *Indonesia Targetkan Daerah dengan Cakupan Vaksinasi Rendah untuk Atasi Penurunan Imunisasi Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-targetkan-daerah-dengan-cakupan-vaksinasi-rendah-untuk-atasi-penurunan>

UNICEF, *Kampanye Imunisasi Kejar Mengatasi Penurunan Signifikan pada Imunisasi Anak di Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/kampanye-imunisasi-kejar-mengatasi-penurunan-signifikan-pada-imunisasi-anak-di.>

UNICEF, *Pembuat Kebijakan Perlu Dengarkan Perspektif Anak Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anak*, <https://www.unicef.org/id/kebijakan-sosial/siaran-pers/pembuat-kebijakan-perlu-dengarkan-perspektif-anak-demi-tingkatkan-kesejahteraan-anak>

WHO, *How Do Vaccines Work*,

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwx-CyBhAqEiwAeOcTdS5nc-_czqY5Q9_DO-mdtLm7rg7rmjbvRHau2Ymxx2t-tOD_57ZqmBoCHZoQAvD_BwE,

WHO, *Upaya Indonesia Mengembalikan Cakupan Imunisasi*,

<https://www.who.int/indonesia/news/events/world-immunization-week/2023>

WHO, *Vaccine Efficacy, Effectiveness, and Protection*,

<https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection>,